

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 29 SEP 2015

Nomor : 42 Tahun 2015

I.A NAMA DAN KODE DESA / KELURAHAN

Kode		Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
1	2	3	
01		Jatibanteng	
01	2001		Pategalan
01	2002		Semambung
01	2003		Sumberanyar
01	2004		Jatibanteng
01	2005		Curahsuri
01	2006		Wringinanom
01	2007		Kembangsari
01	2008		Patemon
02		Besuki	
02	2001		Widoropayung
02	2002		Sumberarjo
02	2003		Jetis
02	2004		Blimbing
02	2005		Langkap
02	2006		Bloro
02	2007		Pesisir
02	2008		Kalimas
02	2009		Besuki
02	2010		Demung
03		Suboh	
03	2001		Cemara
03	2002		Mojodungkol
03	2003		Gunung Malang
03	2004		Gunung Putri
03	2005		Suboh
03	2006		Dawuhan
03	2007		Buduan
03	2008		Ketah
04		Mlandingan	
04	2001		Alasbayur
04	2002		Sumberanyar
04	2003		Campoan

1		2	3
04	2004		Trebungan
04	2005		Sumber Pinang
04	2006		Selomukti
04	2007		Mlandingan Kulon
05		Kendit	
05	2001		Bugeman
05	2002		Kendit
05	2003		Balung
05	2004		Tambak Ukir
05	2005		Rajekwesi
05	2006		Kukusan
05	2007		Klatakan
06		Panarukan	
06	2001		Paowan
06	2002		Sumberkolak
06	2003		Wringinanom
06	2004		Kilensari
06	2005		Peleyan
06	2006		Alasmalang
06	2007		Duwet
06	2008		Gelung
07		Situbondo	
07	2001		Kalibagor
07	2002		Patokan
07	2003		Dawuhan
07	2004		Kotakan
07	2005		Talkandang
07	2006		Olcan
08		Panji	
08	2001		Sliwung
08	2002		Ardirejo
08	2003		Battal
08	2004		Klampokan
08	2005		Juglangan
08	2006		Panji Kidul
08	2007		Mimbaan
08	2008		Panji Lor
08	2009		Tokelan
08	2010		Curah Jeru
08	2011		Tenggir
08	2012		Kayuputih

1		2	3
09		Mangaran	
09	2001		Tanjung Glugur
09	2002		Mangaran
09	2003		Tanjung Kamal
09	2004		Semiring
09	2005		Tanjung Pccinan
09	2006		Trebungan
10		Kapongan	
10	2001		Kandang
10	2002		Curahcotok
10	2003		Peicyan
10	2004		Wonokoyo
10	2005		Seletreng
10	2006		Landangan
10	2007		Kapongan
10	2008		Kcsambirampak
10	2009		Gebangan
10	2010		Pokaan
11		Arjasa	
11	2001		Kayumas
11	2002		Baycman
11	2003		Ketowan
11	2004		Kedungdowo
11	2005		Jatisari
11	2006		Curah Tatal
11	2007		Arjasa
11	2008		Lamongan
12		Jangkar	
12	2001		Sopet
12	2002		Curahkalak
12	2003		Palangan
12	2004		Jangkar
12	2005		Gadingan
12	2006		Kumbangsari
12	2007		Pcsanggrahan
12	2008		Agel
13		Asembagus	
13	2001		Kedunglo
13	2002		Bantal
13	2003		Awar – Awar
13	2004		Perante

1		2	3
13	2005		Trigonco
13	2006		Kertosari
13	2007		Mojosari
13	2008		Ascmbagus
13	2009		Gudang
13	2010		Wringinanom
14		Banyuputih	
14	2001		Wonorejo
14	2002		Sumberanyar
14	2003		Sumberejo
14	2004		Banyuputih
14	2005		Sumberwaru
15		Sumbermalang	
15	2001		Tamankursi
15	2002		Sumberargo
15	2003		Tamansari
15	2004		Kalirejo
15	2005		Badcran
15	2006		Alastengah
15	2007		Taman
15	2008		Tlogosari
15	2009		Plalangan
16		Banyuglugur	
16	2001		Lubawang
16	2002		Kalisari
16	2003		Tepos
16	2004		Sclobanteng
16	2005		Banyuglugur
16	2006		Telemping
16	2007		Kalianget
17		Bungatan	
17	2001		Patemon
17	2002		Sumbertengah
17	2003		Sclowogo
17	2004		Mlandingan Wetan
17	2005		Bungatan
17	2006		Blctok
17	2007		Pasir Putih

I.B SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DESA

KODE	URAIAN
1	PENDAPATAN
2	BELANJA
3	PEMBIAYAAN

I.C KODE REKENING PENDAPATAN DESA

KODE REKENING					URAIAN
1					2
1					PENDAPATAN
1	1				Pendapatan Asli Desa
1	1	1			Hasil Usaha Desa
1	1	1	1		Badan Usaha Milik Desa
1	1	1	2		Tanah Kas Desa
1	1	1	3		Koperasi Desa
1	1	1	4		Lumbung Desa
1	1	1	5		Dst.....
1	1	2			Hasil Aset Desa
1	1	2	1		Pasar Desa
1	1	2	2		Pasar Hewan
1	1	2	3		Tambatan Perahu
1	1	2	4		Bangunan Desa
1	1	2	5		Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa
1	1	2	6		Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa
1	1	2	7		Hutan Desa
1	1	2	8		Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa
1	1	2	9		Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa
1	1	2	10		Pelelangan Ikan yang dikelola Desa
1	1	2	11		Jalan Desa
1	1	2	12		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa
1	1	2	13		Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1	1	2	14		Dst
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3	1		Partisipasi masyarakat untuk kesehatan masyarakat
1	1	3	2		Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah
1	1	3	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat
1	1	3	4		Gotong royong kebersihan desa
1	1	3	5		Dst
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	1	5	1		Hasil penjualan aset desa yang sah
1	1	5	2		Jasa giro
1	1	5	3		Komisi
1	1	5	4		Pungutan Desa
1	1	5	4	1	Pungutan Jasa Usaha
1	1	5	4	2	Dst
1	1	5	5		Pengembalian Atas Hasil Pemeriksaan
1	1	5	5	1	Inspektorat
1	1	5	5	2	BPK
1	1	5	5	3	BPKP
1	1	5	5	4	Dst

1					2
1	2				Pendapatan Transfer
1	2	1			Dana Desa
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
1	2	3			Alokasi Dana Desa
1	2	4			Bantuan Keuangan
1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa
1	2	4	1	2	Dst
1	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
1	2	4	2	1	Bantuan Biaya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa/Balai
1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu
1	2	4	2	3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
1	2	4	2	4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Calon Kepala Desa Terpilih
1	2	4	2	5	Dst
1	3				Pendapatan Lain - lain
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	1	1		Hibah dari pemerintah
1	3	1	2		Hibah dari pemerintah provinsi
1	3	1	3		Hibah dari pemerintah kabupaten/kota
1	3	1	4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta
1	3	1	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan
1	3	1	6		Sumbangan dari
1	3	1	7		Dst
1	3	2			Lain - lain Pendapatan Desa yang sah
1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga
1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
1	3	2	3		Dst

1.D KODE REKENING AKUN BELANJA, KELOMPOK DAN KEGIATAN BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
2	BELANJA
2 1	BIDANG PENYELENGGAPAAAN PEMERINTAHAN DESA
2 1	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1	2 Operasional Perkantoran
2 1	3 Operasional BPD
2 1	4 Operasional RT/RW
2 1	5 Operasional LPM
2 1	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa
2 1	7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa
2 1	8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa
2 1	9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Darat
2 1	10 Pengadaan Pakaian Dinas
2 1	11 Peringatan hari besar nasional
2 1	12 Peringatan hari besar keagamaan
2 1	13 Pendidikan dan pelatihan formal
2 1	14 Sosialisasi peraturan perundang undangan
2 1	15 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
2 1	16 Sosialisasi peraturan desa
2 1	17 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
2 1	18 Penyelenggaraan Musyawarah Mufakat Penetapan Anggota BPD
2 1	19 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
2 1	20 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2 1	21 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2 1	22 Pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa
2 1	23 Penyusunan Laporan Keuangan Desa
2 1	24 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat/tokoh agama
2 1	25 Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPD
2 1	26 Rapat rapat Paripurna
2 1	27 Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota BPD
2 1	28 Penyediaan barang dan jasa BPD
2 1	29 Dialog/audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
2 1	30 Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa
2 1	31 Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
2 1	32 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
2 1	33 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
2 1	34 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
2 1	35 Dst.....
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2	1 Pembangunan Jalan Desa
2 2	2 Pembangunan Jembatan Desa
2 2	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa
2 2	4 Pembangunan saluran drainase
2 2	5 Pembangunan gorong gorong
2 2	6 Pembangunan bronjong
2 2	7 Pembangunan plengsengan
2 2	8 Pembangunan tangkis
2 2	9 Pembangunan Pasar Desa
2 2	10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa
2 2	11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa
2 2	12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa
2 2	13 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase
2 2	14 Rehabilitasi/Pemeliharaan gorong gorong
2 2	15 Rehabilitasi/pemeliharaan bronjong
2 2	16 Rehabilitasi/pemeliharaan plengsengan
2 2	17 Rehabilitasi/pemeliharaan tangkis
2 2	18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Desa
2 2	19 Pengadaan alat - alat berat
2 2	20 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel
2 2	21 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
2 2	22 Pembangunan MCK Umum
2 2	23 Pembangunan Gapura
2 2	24 Pembangunan sumur sumur air tanah
2 2	25 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1	2
26	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
27	Pembangunan gedung perpustakaan desa
28	Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana Kesehatan Tingkat Desa
29	Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat berat
30	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
31	Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
32	Rehabilitasi/pemeliharaan MCK Umum
33	Rehabilitasi/pemeliharaan Gapura
34	Rehabilitasi/pemeliharaan sumur sumur air tanah
35	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah
36	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
37	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung perpustakaan desa
38	Pembangunan jaringan irigasi
39	Pembangunan jaringan air bersih/minum
40	Pembangunan pintu air
41	Pembangunan tutup saluran irigasi/Plat Dack
42	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
43	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/minum
44	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
45	Rehabilitasi/pemeliharaan tutup saluran irigasi/Plat Dack
46	Pembangunan sumur sumur air tanah
47	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
48	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
49	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
50	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
51	Penyusunan Profil Desa
52	Penyusunan Monografi Desa
53	Penyusunan Potensi Desa
54	Pembangunan Lumbung Desa
55	Rehabilitasi sedang/berat Lumbung Desa
56	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
57	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
58	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
59	Pembibitan dan perawatan ternak
60	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
61	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
62	Pembangunan tempat pelelangan ikan
63	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
64	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
65	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
66	Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini
67	Pengadaan sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
68	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini
69	Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD
70	Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
71	Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan;
72	Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
73	Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
74	Pendataan pendidikan di desa;
75	Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
76	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular;
77	Pemantauan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa
78	Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS
79	Identifikasi masalah kesehatan
80	Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
81	Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
82	Pemberian makanan tambahan dan vitamin
83	Pemberian makanan tambahan di Posyandu
84	Pembangunan dan Penguatan posyandu
85	Pengadaan sarana dan Prasarana kesehatan tingkat desa;
86	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana prasarana Kesehatan Tingkat Desa
87	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kesenian Di Desa
88	Pelestarian budaya gotong royong, gugur gunung, dll
89	Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
90	Fasilitasi permodalan bagi UMK (usahamikro kecil);
91	Penguatan kapasitas kelompok UMK;
92	Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling);
93	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
94	Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;

1	2
2 2	95 Pemasyarakatan olah raga;
2 2	96 Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
2 2	97 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2 2	98 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
2 2	99 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan
2 2	100 Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan
2 2	101 Pengadaan dan pengelolaan Arsip Desa;
2 2	102 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
2 2	103 Dst.....
2 3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2 3	1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2 3	2 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2 3	3 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2 3	4 Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa;
2 3	5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa
2 3	6 Dst.....
2 4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 4	1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2 4	2 Penyelenggaraan Musrenbangdes
2 4	3 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2 4	4 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)
2 4	5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
2 4	6 Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 4	7 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
2 4	8 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
2 4	9 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan sosial
2 4	10 Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat
2 4	11 Bulan Bakti Gotong Royong
2 4	12 Pembinaan dan Penyuluhan Keagamaan
2 4	13 Selamatan Desa
2 4	14 Lomba Desa
2 4	15 Pelatihan RT/RW
2 4	16 Pelatihan Perbengkelan
2 4	17 Pelatihan Tata Rias Wajah
2 4	18 Pelatihan Mekanik Mesin Pompa Bor
2 4	19 Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
2 4	20 Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
2 4	21 Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
2 4	22 Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan perikanan
2 4	23 Pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif
2 4	24 Pelatihan keterampilan usaha perbengkelan
2 4	25 Dst.....
2 5	BIDANG BELANJA TAK TERDUGA
2 5	1 Kejadian Luar Biasa
2 5	2 Dst.....

LE KODE REKENING JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK BELANJA DESA

KODE REKENING			URAIAN
1			2
1			Belanja Pegawai
1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	2	dst.....
1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
1	2	1	Tunjangan
1	2	2	dst.....
1	3		Tunjangan BPD
1	3	1	Tunjangan BPD
1	3	2	dst.....
2			Belanja Barang dan Jasa
2	1		Honor Tim/Panitia
2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
2	1	2	Honor Narasumber
2	1	3	Dst
2	2		Honor/upah harian
2	2	1	Ongkos tukang
2	2	2	Honor Petugas Kebersihan
2	2	3	Honor Petugas Penjaga Malam
2	2	4	Dst
2	3		Uang Lembur
2	3	1	Uang Lembur Perangkat Desa
2	3	2	Uang Lembur
2	3	3	Dst
2	4		Belanja Perjalanan Dinas
2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa
2	4	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
2	4	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
2	4	4	Belanja Bantuan Transport
2	4	5	Dst
2	5		Belanja Bahan/Material
2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan
2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman
2	5	3	Belanja bibit ternak
2	5	4	Belanja bahan obat obatan
2	5	5	Belanja bahan kimia
2	5	6	Belanja Bahan Peralatan
2	5	7	Belanja Bahan Perlengkapan
2	5	8	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan
2	5	9	Belanja Bahan Pokok
2	5	10	Dst

1		2
2	6	Belanja Bahan Pakai Habis
2	6	1 Belanja alat tulis kantor
2	6	2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
2	6	3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2	6	4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2	6	5 Dst
2	7	Belanja Jasa Kantor
2	7	1 Belanja Telepon
2	7	2 Belanja Air
2	7	3 Belanja Listrik
2	7	4 Belanja Surat Kabar/Majalah
2	7	5 Belanja kawat/faksimili/internet
2	7	6 Belanja paket/pengiriman
2	7	7 Belanja sertifikat
2	7	8 Belanja dokumentasi
2	7	9 Belanja Dekorasi
2	7	10 Dst
2	8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2	8	1 Belanja Jasa Service
2	8	2 Belanja Penggantian Suku Cadang
2	8	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2	8	4 Belanja Jasa KIR
2	8	5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2	8	6 Dst
2	9	Belanja Cetak dan Penggandaan
2	9	1 Belanja Cetak
2	9	2 Belanja Penggandaan
2	9	3 Dst
2	10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2	10	1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2	10	2 Dst
2	11	Belanja Sewa Alat Berat
2	11	1 Belanja Sewa Eskavator
2	11	2 Belanja Sewa Buldoser
2	11	3 Dst
2	12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2	12	1 Belanja sewa meja kursi
2	12	2 Belanja sewa komputer dan printer
2	12	3 Belanja sewa proyektor
2	12	4 Belanja sewa generator
2	12	5 Belanja sewa tenda
2	12	6 Belanja sewa sound system
2	12	7 Dst
2	13	Belanja Makanan dan Minuman
2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat
2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu
2	13	4 Dst
2	14	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2	14	1 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2	14	2 Dst

1		2	
2	15		Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
2	15	1	Belanja pakaian KORPRI
2	15	2	Belanja pakaian batik tradisional
2	15	3	Belanja pakaian olahraga
2	15	4	Dst
2	16		Belanja Jasa Pihak Ketiga
2	16	1	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2	16	2	Dst
2	17		Belanja Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	17	1	Belanja perawatan komputer
2	17	2	Belanja perawatan AC/kipas angin
2	17	3	Belanja Perawatan tape/sound system
2	17	4	Belanja Perawatan alat komunikasi
2	17	5	Belanja Perawatan meja/kursi/rak/lemari
2	17	6	Belanja Perawatan mesin tik
2	17	7	Belanja Perawatan printer
2	17	8	Dst
2	18		Belanja Pemeliharaan
2	18	1	Belanja Pemeliharaan Jalan
2	18	2	Belanja Pemeliharaan Jembatan
2	18	3	Belanja Pemeliharaan Lampu Pencerangan Jalan
2	18	4	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
2	18	5	Belanja Pemeliharaan Bangunan
2	18	6	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
2	18	7	Dst
2	19		Belanja Jasa Konsultasi
2	19	1	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
2	19	2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
2	19	3	Dst
2	20		Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2	20	1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2	20	2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga
2	20	3	Dst
2	21		Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2	21	1	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
2	21	2	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat Pihak Ketiga
2	21	3	Dst
3			BELANJA MODAL
3	1		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
3	1	1	Belanja Modal Pengadaan mesin las
3	1	2	Belanja Modal Pengadaan mesin bubut
3	1	3	Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
3	1	4	Belanja Modal Pengadaan mesin kompresor
3	1	5	Dst.....
3	2		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3	2	1	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
3	2	2	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
3	2	3	Belanja modal pengadaan mesin bajak
3	2	4	Belanja modal pengadaan alat penetas
3	2	5	Dst.....

1		2
3	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3	3	1 Belanja modal pengadaan mesin tik
3	3	2 Belanja modal pengadaan mesin hitung
3	3	3 Belanja modal pengadaan sound system
3	3	4 Belanja modal pengadaan kipas angin
3	3	5 Belanja modal pengadaan AC
3	3	6 Belanja modal pengadaan Televisi
3	3	7 Belanja modal pengadaan Parabola/Digital
3	3	8 Dst.....
3	4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3	4	1 Belanja modal pengadaan almari
3	4	2 Belanja modal pengadaan brankas
3	4	3 Belanja modal pengadaan filling kabinet
3	4	4 Belanja modal pengadaan white board
3	4	5 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
3	4	6 Belanja modal pengadaan podium
3	4	7 Belanja modal pengadaan neon box
3	4	8 Belanja modal pengadaan senter
3	4	9 Dst.....
3	5	Belanja Modal Pengadaan Komputer
3	5	1 Belanja modal pengadaan komputer/PC
3	5	2 Belanja modal pengadaan komputer note book
3	5	3 Belanja modal pengadaan printer
3	5	4 Belanja modal pengadaan scanner
3	5	5 Belanja modal pengadaan monitor/display
3	5	6 Belanja modal pengadaan CPU
3	5	7 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
3	5	8 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (hardisk, speaker)
3	5	9 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
3	5	10 Dst.....
3	6	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur
3	6	1 Belanja modal pengadaan meja kerja
3	6	2 Belanja modal pengadaan meja rapat
3	6	3 Belanja modal pengadaan kursi kerja
3	6	4 Belanja modal pengadaan kursi rapat
3	6	5 Belanja modal pengadaan sofa/meja kursi tamu
3	6	6 Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
3	6	7 Dst.....
3	7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
3	7	1 Belanja modal pengadaan kamera
3	7	2 Belanja modal pengadaan handycam
3	7	3 Belanja modal pengadaan proyektor
3	7	4 Dst.....

1		2	
3	8		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat komunikasi
3	8	1	Belanja modal pengadaan telepon
3	8	2	Belanja modal pengadaan faximili
3	8	3	Dst.....
3	9		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3	9	1	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
3	9	2	Belanja modal pengadaan paving halaman
3	9	3	Belanja modal pengadaan konstruksi plengsengan jalan
3	9	4	Belanja modal pengadaan konstruksi tangkis jalan
3	9	5	Belanja modal pengadaan konstruksi gorong-gorong jalan
3	9	6	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase jalan
3	9	7	Dst.....
3	10		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
3	10	1	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
3	10	2	Dst.....
3	11		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan
3	11	1	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan
3	11	2	Dst.....
3	12		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
3	12	1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
3	12	2	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
3	12	3	Dst.....
3	13		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
3	13	1	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
3	13	2	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
3	13	3	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pos jaga/ronda
3	13	4	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur bor
3	13	5	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar
3	13	6	Belanja modal pengadaan konstruksi gapura
3	13	7	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung perpustakaan
3	13	8	Belanja modal pengadaan konstruksi MCK
3	13	9	Dst.....
3	14		Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
3	14	1	Belanja modal pengadaan ternak
3	14	2	Belanja modal pengadaan tanaman
3	14	3	Dst.....
3	15		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3	15	1	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
3	15	2	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
3	15	3	
3	16		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3	16	1	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Desa
3	16	2	Dst.....
3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
			Tidak Bermotor
3	17	1	Belanja Modal Pengadaan Sepeda
3	17	2	Dst.....

1		2	
3	18		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3	18	1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
3	18	2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
3	18	3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air
3	18	4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Plongsengan Saluran Air
3	18	5	Dst.....
3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
3	19	1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen
3	19	2	Dst.....
			Belanja Tidak Langsung
			Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
1			Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2			Dana Stimulan BPD
3			Dst.....
			Tambahan Penghasilan Aparat Desa
1			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
3			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
4			Dst
			Belanja Hibah
1			Belanja Hibah kepada BUMDes
1	1		BUMDes
1	2		Dst
2			Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
2	1		Badan/Lembaga/Organisasi
2	2		Dst
3			Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
3	1		Belanja Hibah kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu
3	2		Belanja Hibah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
3	3		Belanja Hibah kepada Calon Kepala Desa Terpilih
3	4		Belanja Hibah kepada Panitia Musyawarah Mufakat Penetapan Anggota BPD
3	5		Dst
4			Dst
			Belanja Bantuan Sosial :
1			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2			Dst
			Belanja Bantuan Keuangan
1			Dst
			Belanja tak terduga
1			Keadaan darurat
2			Bencana alam
3			Dst.....

I.F KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING					URAIAN
1					2
3					PEMBIAYAAN
3	1				Penerimaan Pembiayaan
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
3	1	1	1		Pelampauan penerimaan PADesa
3	1	1	1	1	Hasil Usaha Desa
3	1	1	1	2	Hasil Asct Desa
3	1	1	1	3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
3	1	1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
3	1	1	2		Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
3	1	1	2	1	Belanja Pegawai
3	1	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa
3	1	1	2	3	Belanja Modal
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan Nomor
3	1	2	1	2	Dst.....
3	1	3			Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
3	1	3	1		Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes
3	1	3	2		BUMDes
3	1	3	3		Dst
3	1	4			Penerimaan Pinjaman
3	1	4	1		Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari
3	1	4	2		Dst
3	2				Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
3	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan Nomor
3	2	1	2		Dst
3	2	2			Penyertaan Modal Desa
3	2	2	1		Badan Usaha Milik Desa
3	2	2	1	1	BUMDes
3	2	2	1	2	Dst
3	2	2	2		Badan/Lembaga/Organisasi
3	2	2	2	1	Badan/Lembaga/Organisasi
3	2	2	2	2	Dst

1					2
3	2	2	3		Kelompok/Anggota Masyarakat
3	2	2	3	1	Kelompok/Anggota Masyarakat
3	2	2	3	2	Dst
3	2	2	4		Dst
					JUMLAH PEMBIAYAAN

1.6 URUTAN SUSUNAN NODE REKENING APBDESA

Pemerintah Desa dapat mengembangkan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik desa.

Contoh :

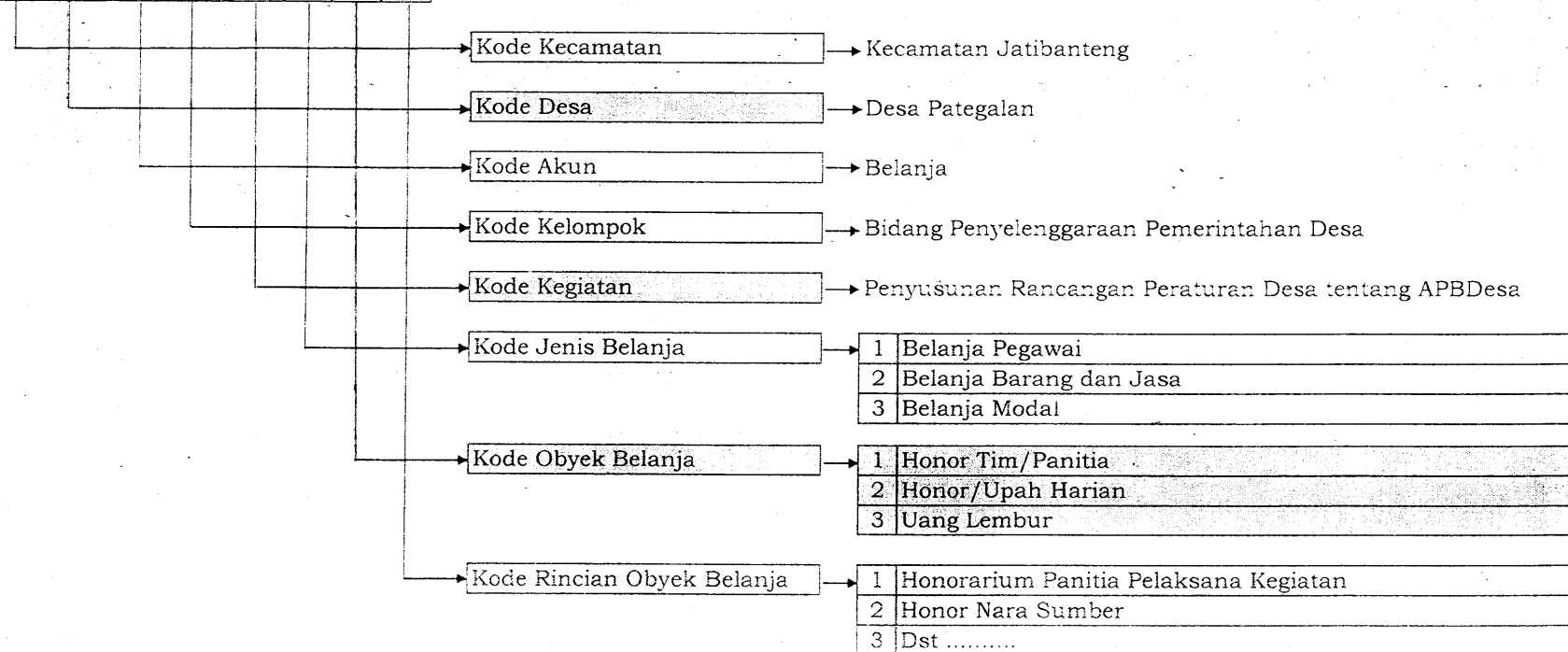
- Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng merencanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut :

01
01 2001
01 2001 2
01 2001 2 1
01 2001 2 1 28
01 2001 2 1 28 1
01 2001 2 1 28 1 1
01 2001 2 1 28 1 1 1

Kecamatan Jatibanteng
Desa Pategalan
Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Belanja Pegawai
Honor Tim/Panitia
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

PENJELASAN KODE REKENING

01.	2001.	2	1	28	1	1	1
-----	-------	---	---	----	---	---	---



**I.H FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes
BESERTA LAMPIRAN**

I.H.1. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN.....

DESA

Alamat :Telp:.....

**RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Tahun Anggaran.....
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pertun di Desa;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20....– 20... (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor ...);
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

Dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Pendapatan desa | Rp. |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. |
| | b. Bidang Pembangunan | Rp. |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| | e. Bidang Tak Terduga | Rp. |
| | Jumlah Belanja | Rp. |
| | Surplus/Defisit | <u>Rp.</u> |
| 3. | Pembiayaan Desa | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| | Salisih Pembiayaan (a - b). | <u>Rp.</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

**(NAMA LENGKAP/TANPA
GELAR)**

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA
.....,

(NAMA LENGKAP/TANPA GELAR)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

1.H.2. RINCIAN APBDes

LAMPIRAN Peraturan Desa
Tanggal :
Nomor : Tahun

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1							2	3	4
XX	XXXX	1					PENDAPATAN		
		1	1				Pendapatan Asli Desa		
		1	1	1			Hasil Usaha Desa		
		1	1	1	1		Badan Usaha Milik Desa		
		1	1	1	2		Tanah Kas Desa		
		1	1	1	3		Koperasi Desa		
		1	1	1	4		Lumbung Desa		
		1	1	1	5		Dst.....		
		1	1	2			Hasil Asct Desa		
		1	1	2	1		Pasar Desa		
		1	1	2	2		Pasar Hewan		
		1	1	2	3		Tambatan Perahu		
		1	1	2	4		Bangunan Desa		
		1	1	2	5		Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa		
		1	1	2	6		Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa		
		1	1	2	7		Hutan Desa		
		1	1	2	8		Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa		
		1	1	2	9		Tempat tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa		
		1	1	2	10		Pelclangan Ikan yang dikelola Desa		
		1	1	2	11		Jalan Desa		
		1	1	2	12		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa		
		1	1	2	13		Lain lain Kekayaan Milik Desa		
		1	1	2	14		Dst		
		1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
		1	1	3	1		Partisipasi masyarakat untuk keschatan masyarakat		
		1	1	3	2		Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah		
		1	1	3	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat		
		1	1	3	4		Gotong royong kebersihan desa		
		1	1	3	5		Dst		

		1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
		1	1	5	1		Hasil penjualan aset desa yang sah		
		1	1	5	2		Jasa giro		
		1	1	5	3		Komisi		
		1	1	5	4		Pungutan Desa		
		1	1	5	4	1	Pungutan Jasa Usaha		
		1	1	5	4	2	Dst		
		1	1	5	5		Pengembalian Atas Hasil Pemeriksaan		
		1	1	5	5	1	Inspektorat		
		1	1	5	5	2	BPK		
		1	1	5	5	3	BPKP		
		1	1	5	5	4	Dst		
		1	2				Pendapatan Transfer		
		1	2	1			Dana Desa		
		1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		
		1	2	3			Alokasi Dana Desa		
		1	2	4			Bantuan Keuangan		
		1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
		1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa		
		1	2	4	1	2	Dst		
		1	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten		
		1	2	4	2	1	Bantuan Biaya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa/Balai Desa		
		1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Guru Ngaji dan Guru Minggu		
		1	2	4	2	3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa		
		1	2	4	2	4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Calon Kepala Desa Terpilih		
		1	2	4	2	5	Dst		
		1	3				Pendapatan Lain - lain		
		1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
		1	3	1	1		Hibah dari pemerintah		
		1	3	1	2		Hibah dari pemerintah provinsi		
		1	3	1	3		Hibah dari pemerintah kabupaten/kota		
		1	3	1	4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
		1	3	1	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan		
		1	3	1	6		Sumbangan dari		
		1	3	1	7		Dst		

	1	3	2				Lain - lain Pendapatan Desa yang sah		
	1	3	2	1			Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga		
	1	3	2	2			Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
	1	3	2	3			Dst		
							JUMLAH PENDAPATAN		
	2						BELANJA		
	2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	2	1	1	1			Belanja Pegawai		
	2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	2	1	1	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	2	1	1	1	2	1	Tunjangan		
	2	1	1	1	2	2	dst		
	2	1	1	1	3		Tunjangan BPD		
	2	1	1	1	3	1	Tunjangan		
	2	1	1	1	3	2	dst		
	2	1	2				Operasional Perkantoran		
	2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	1	2	2	4		Belanja Perjalanan Dinas		
	2	1	2	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa		
	2	1	2	2	4	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan		
	2	1	2	2	4	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		
	2	1	2	2	4	4	Belanja Bantuan Transport		
	2	1	2	2	4	5	Dst		
	2	1	2	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis		
	2	1	2	2	6	1	Belanja alat tulis kantor		
	2	1	2	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
	2	1	2	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
	2	1	2	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
	2	1	2	2	6	5	Dst		

		2	1	2	2	7	Belanja Jasa Kantor		
		2	1	2	2	7	1 Belanja Telepon		
		2	1	2	2	7	2 Belanja Air		
		2	1	2	2	7	3 Belanja Listrik		
		2	1	2	2	7	4 Belanja Surat Kabar/Majalah		
		2	1	2	2	7	5 Belanja kawat/faksimili/internet		
		2	1	2	2	7	6 Belanja paket/pengiriman		
		2	1	2	2	7	7 Belanja sertifikat		
		2	1	2	2	7	8 Belanja dokumentasi		
		2	1	2	2	7	9 Belanja Dekorasi		
		2	1	2	2	7	10 Dst		
		2	1	2	2	8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
		2	1	2	2	8	1 Belanja Jasa Service		
		2	1	2	2	8	2 Belanja Penggantian Suku Cadang		
		2	1	2	2	8	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		
		2	1	2	2	8	4 Belanja Jasa KIR		
		2	1	2	2	8	5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
		2	1	2	2	8	6 Dst		
		2	1	2	3		BELANJA MODAL		
		2	1	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		
		2	1	2	3	3	1 Belanja modal pengadaan mesin tik		
		2	1	2	3	3	2 Belanja modal pengadaan mesin hitung		
		2	1	2	3	3	3 Belanja modal pengadaan sound system		
		2	1	2	3	3	4 Belanja modal pengadaan kipas angin		
		2	1	2	3	3	5 Belanja modal pengadaan AC		
		2	1	2	3	3	6 Belanja modal pengadaan Televisi		
		2	1	2	3	3	7 Belanja modal pengadaan Parabola/Digital		
		2	1	2	3	3	8 Dst.....		
		2	1	2	3	4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		
		2	1	2	3	4	1 Belanja modal pengadaan almari		
		2	1	2	3	4	2 Belanja modal pengadaan brankas		
		2	1	2	3	4	3 Belanja modal pengadaan filing kabinet		
		2	1	2	3	4	4 Belanja modal pengadaan white board		
		2	1	2	3	4	5 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu		
		2	1	2	3	4	6 Belanja modal pengadaan podium		
		2	1	2	3	4	7 Belanja modal pengadaan neon box		
		2	1	2	3	4	8 Belanja modal pengadaan senter		
		2	1	2	3	4	9 Dst.....		

	2	1	2	3	5		Belanja Modal Pengadaan Komputer		
	2	1	2	3	5	1	Belanja modal pengadaan komputer/PC		
	2	1	2	3	5	2	Belanja modal pengadaan komputer note book		
	2	1	2	3	5	3	Belanja modal pengadaan printer		
	2	1	2	3	5	4	Belanja modal pengadaan scanner		
	2	1	2	3	5	5	Belanja modal pengadaan monitor/display		
	2	1	2	3	5	6	Belanja modal pengadaan CPU		
	2	1	2	3	5	7	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer		
	2	1	2	3	5	8	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (hardisk, speaker)		
	2	1	2	3	5	9	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer		
	2	1	2	3	5	10	Dst.....		
	2	1	2	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeleur		
	2	1	2	3	6	1	Belanja modal pengadaan meja kerja		
	2	1	2	3	6	2	Belanja modal pengadaan meja rapat		
	2	1	2	3	6	3	Belanja modal pengadaan kursi kerja		
	2	1	2	3	6	4	Belanja modal pengadaan kursi rapat		
	2	1	2	3	6	5	Belanja modal pengadaan sofa/meja kursi tamu		
	2	1	2	3	6	6	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kcambang		
	2	1	2	3	6	7	Dst.....		
	2	1	3				Operasional BPD		
	2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	1	3	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis		
	2	1	3	2	6	1	Belanja alat tulis kantor		
	2	1	3	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
	2	1	3	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
	2	1	3	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
	2	1	3	2	6	5	Dst		
	2	1	3	2	13		Belanja Makanan dan Minuman		
	2	1	3	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
	2	1	3	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
	2	1	3	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
	2	1	3	2	13	4	Dst		

	2	1	4				Operasional RT/RW		
	2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	1	4	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis		
	2	1	4	2	6	1	Belanja alat tulis kantor		
	2	1	4	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
	2	1	4	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
	2	1	4	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
	2	1	4	2	6	5	Dst		
	2	1	4	2	13		Belanja Makanan dan Miruman		
	2	1	4	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
	2	1	4	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
	2	1	4	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
	2	1	4	2	13	4	Dst		
	2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	2	2	1				Pembangunan Jalan Desa		
	2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	2	1	2	1		Honor Tim/Panitia		
	2	2	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		
	2	2	1	2	1	2	Honor Narasumber		
	2	2	1	2	1	3	Dst		
	2	2	1	2	2		Honor/upah harian		
	2	2	1	2	2	1	Ongkos tukang		
	2	2	1	2	2	2	Honor Petugas Kebersihan		
	2	2	1	2	2	3	Honor Petugas Penjaga Malam		
	2	2	1	2	2	4	Dst		
	2	2	...				Kegiatan		
	2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	2	3	1				Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
	2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	3	1	2	1		Honor Tim/Panitia		
	2	3	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		
	2	3	1	2	1	2	Honor Narasumber		
	2	3	1	2	1	3	Dst		

		2	3	1	2	5		Belanja Bahan/ Material		
		2	3	1	2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan		
		2	3	1	2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman		
		2	3	1	2	5	3	Belanja bibit ternak		
		2	3	1	2	5	4	Belanja bahan obat - obatan		
		2	3	1	2	5	5	Belanja bahan kimia		
		2	3	1	2	5	6	Belanja Bahan Peralatan		
		2	3	1	2	5	7	Belanja Bahan Perlengkapan		
		2	3	1	2	5	8	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan		
		2	3	1	2	5	9	Belanja Bahan Pokok		
		2	3	1	2	5	10	Dst		
		2	3	1	2	13		Belanja Makanan dan Minuman		
		2	3	1	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
		2	3	1	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
		2	3	1	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
		2	3	1	2	13	4	Dst		
		2	3	5				Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa		
		2	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
		2	3	5	2	1		Honor Tim/Panitia		
		2	3	5	2	1	6	Honor Guru Ngaji/Guru Minggu .		
		2	3	5	2	1	7	Dst		
		2	3	...				Kegiatan		
		2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
		2	4	1				Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
		2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
		2	4	1	2	1		Honor Tim/Panitia		
		2	4	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		
		2	4	1	2	1	2	Honor Narasumber		
		2	4	1	2	1	3	Dst		
		2	4	1	2	5		Belanja Bahan/ Material		
		2	4	1	2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan		
		2	4	1	2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman		
		2	4	1	2	5	3	Belanja bibit ternak		
		2	4	1	2	5	4	Belanja bahan obat - obatan		
		2	4	1	2	5	5	Belanja bahan kimia		

		2	4	1	2	5	6	Belanja Bahan Peralatan		
		2	4	1	2	5	7	Belanja Bahan Perlengkapan		
		2	4	1	2	5	8	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan		
		2	4	1	2	5	9	Belanja Bahan Pokok		
		2	4	1	2	5	10	Dst		
		2	4	1	2	13		Belanja Makanan dan Minuman		
		2	4	1	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
		2	4	1	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
		2	4	1	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
		2	4	1	2	13	4	Dst		
		2	4	2				Kegiatan		
		2	5					Bidang Tak Terduga		
		2	5	1				Kejadian Luar Biasa		
		2	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
		2	5	1	2	1		Honor Tim/Panitia		
		2	5	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		
		2	5	1	2	1	2	Honor Narasumber		
		2	5	1	2	1	3	Dst		
		2	5	1	2	5		Belanja Bahan/Material		
		2	5	1	2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan		
		2	5	1	2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman		
		2	5	1	2	5	3	Belanja bibit ternak		
		2	5	1	2	5	4	Belanja bahan obat-obatan		
		2	5	1	2	5	5	Belanja bahan kimia		
		2	5	1	2	5	6	Belanja Bahan Peralatan		
		2	5	1	2	5	7	Belanja Bahan Perlengkapan		
		2	5	1	2	5	8	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan		
		2	5	1	2	5	9	Belanja Bahan Pokok		
		2	5	1	2	5	10	Dst		

		2	5	1	2	13		Belanja Makanan dan Minuman		
		2	5	1	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
		2	5	1	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
		2	5	1	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
		2	5	1	2	13	4	Dst		
		2	5	2				Kegiatan		
								JUMLAH BELANJA		
								SURPLUS / DEFISIT		
		3						PEMBIAYAAN		
		3	1					Penerimaan Pembiayaan		
		3	1	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
		3	1	1	1			Pelampauan penerimaan PADesa		
		3	1	1	1	1		Hasil Usaha Desa		
		3	1	1	1	2		Hasil Aset Desa		
		3	1	1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
		3	1	1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
		3	1	1	2			Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya		
		3	1	1	2	1		Belanja Pegawai		
		3	1	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		3	1	1	2	3		Belanja Modal		
		3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
		3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan		
		3	1	2	1	1		Pencairan Dana Cadangan Nomor		
		3	1	2	1	2		Dst.....		
		3	1	3				Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.		
		3	1	3	1			Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes		
		3	1	3	2			BUMDes		
		3	1	3	3			Dst		
		3	1	4				Penerimaan Pinjaman		
		3	1	4	1			Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari		
		3	1	4	2			Dst		
		3	2					Pengeluaran Pembiayaan		
		3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
		3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Nomor		
		3	2	1	2			Dst		

		3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
		3	2	2	1			Badan Usaha Milik Desa		
		3	2	2	1	1		BUMDes		
		3	2	2	1	2		Dst		
		3	2	2	2			Badan/Lembaga/Organisasi		
		3	2	2	2	1		Badan/Lembaga/Organisasi		
		3	2	2	2	2		Dst		
		3	2	2	3			Kelompok/Anggota Masyarakat		
		3	2	2	3	1		Kelompok/Anggota Masyarakat		
		3	2	2	3	2		Dst		
		3	2	2	4			Dst		
								JUMLAH PEMBIAYAAN		

.....,tanggal

Kepala Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap/tanpa gelar)

1.1 FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA

Nomor : (nomor desa)

Nomor : (nomor BPD)

KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**KEPALA DESA..... DAN BPD.....
KABUPATEN SITUBONDO**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (nama lengkap) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang beralamat di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. (nama lengkap) : Ketua BPD Desa

3. (nama lengkap) : Wakil Ketua BPD Desa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDes Tahun Anggaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Situbondo untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA DESA
.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

KETUA BPD
.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA BPD
.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**I.J FORMAT PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDes**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN.....

KEPALA DESA

Alamat :.....Telp:.....

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang **Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pertukar di Desa;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20....-20... (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor ...);
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA..... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | <u>Rp.</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Pencrimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | <u>Rp.</u> |

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

**(NAMA LENGKAP/TANPA
GELAR)**

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA
.....,

(NAMA LENGKAP/TANPA GELAR)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

II. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian pendanaan :

[illegible]

Situbondo,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APIBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
4. Kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. Kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
8. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

**III.A. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
APBDes BESERTA LAMPIRAN**

**III.A.1. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
APBDes**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN.....

KEPALA DESA

Alamat :.....Telp:.....

**RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja serta terjadinya perubahan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran.....; perlu membentuk Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pertun di Desa;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor)
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor);
 27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20....– 20... (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor ...);
 28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
.....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran Semula berjumlah Rp..... bertambah / berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan desa setelah perubahan | Rp. |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit Setelah Perubahan | <u>Rp.</u> |
| 3. Pembiayaan Desa setelah perubahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan | <u>Rp.</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA TERANG/TANPA GELAR

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....,

(NAMA LENGKAP/TANPA GELAR)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

III.A.2. RINCIAN PERUBAHAN APBDes

LAMPIRAN Peraturan Desa
Tanggal
Nomor Tahun.....

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING							URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1							2	3	4	5	6	7
XX	XXXX	1					PENDAPATAN					
		1	1				Pendapatan Asli Desa					
		1	1	1			Hasil Usaha Desa					
		1	1	1	1		Badan Usaha Milik Desa					
		1	1	1	2		Tanah Kas Desa					
		1	1	1	3		Koperasi Desa					
		1	1	1	4		Lumbung Desa					
		1	1	1	5		Dst.....					
		1	1	2			Hasil Aset Desa					
		1	1	2	1		Pasar Desa					
		1	1	2	2		Pasar Hewan					
		1	1	2	3		Tambatan Perahu					
		1	1	2	4		Bangunan Desa					
		1	1	2	5		Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa					
		1	1	2	6		Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa					
		1	1	2	7		Hutan Desa					
		1	1	2	8		Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa					
		1	1	2	9		Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa					
		1	1	2	10		Pelelangan Ikan yang dikelola Desa					
		1	1	2	11		Jalan Desa					
		1	1	2	12		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa					
		1	1	2	13		Lain-lain Kekayaan Milik Desa					
		1	1	2	14		Dst					

1					2	3	4	5	6	7
		1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
		1	1	3	1	Partisipasi masyarakat untuk kesehatan masyarakat				
		1	1	3	2	Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah				
		1	1	3	3	Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat				
		1	1	3	4	Gotong royong kebersihan desa				
		1	1	3	5	Dst				
		1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
		1	1	5	1	Hasil penjualan aset desa yang sah				
		1	1	5	2	Jasa giro				
		1	1	5	3	Komis:				
		1	1	5	4	Pungutan Desa				
		1	1	5	4	Pungutan Jasa Usaha				
		1	1	5	4	2	Dst			
		1	1	5	5	Pengembalian Atas Hasil Pemeriksa				
		1	1	5	5	1	Inspektorat			
		1	1	5	5	2	BPK			
		1	1	5	5	3	BPKP			
		1	1	5	5	4	Dst			
		1	2			Pendapatan Transfer				
		1	2	1		Dana Desa				
		1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten				
		1	2	3		Alokasi Dana Desa				
		1	2	4		Bantuan Keuangan				
		1	2	4	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi				
		1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa			
		1	2	4	1	2	Dst			
		1	2	4	2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten				
		1	2	4	2	1	Bantuan Biaya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa/Balai Desa			
		1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Guru Ngaji dan Guru Minggu			

1			2			3	4	5	6	7
	1	2	3	Bantuan Kerjasama Khusus Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa						
	1	2	4	Bantuan Kerjasama Khusus Kepada Calon Kepala Desa Terpilih						
	1	2	5	Dst						
	1	3		Pendapatan Lain - lain						
	1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
	1	3	1	Hibah dari pemerintah						
	1	3	2	Hibah dari pemerintah provinsi						
	1	3	3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota						
	1	3	4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta						
	1	3	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan						
	1	3	6	Sumbangan dari						
	1	3	7	Dst						
	1	3	2	Lain - lain Pendapatan Desa yang sah						
	1	3	2	Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga						
	1	3	2	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa						
	1	3	3	Dst						
				JUMLAH PENDAPATAN						
	2			BELANJA						
	2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
	2	1	1	Belanja Pegawai						
	2	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat						
	2	1	1	: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa						
	2	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat						
	2	1	2	: Tunjangan						
	2	1	2	dst						
	2	1	3	Tunjangan BPD						
	2	1	3	: Tunjangan						
	2	1	3	dst						

1						2	3	4	5	6	7
	2	1	2			Operasional Perkantoran					
	2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa					
	2	1	2	2	4	Belanja Perjalanan Dinas					
	2	1	2	2	4	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa					
	2	1	2	2	4	2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan					
	2	1	2	2	4	3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					
	2	1	2	2	4	4 Belanja Bantuan Transport					
	2	1	2	2	4	5 Dst					
	2	1	2	2	6	Belanja Bahan Pakai Habis					
	2	1	2	2	6	1 Belanja alat tulis kantor					
	2	1	2	2	6	2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)					
	2	1	2	2	6	3 Belanja perangko, material dan benda pos lainnya					
	2	1	2	2	6	4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					
	2	1	2	2	6	5 Dst					
	2	1	2	2	7	Belanja Jasa Kantor					
	2	1	2	2	7	1 Belanja Telepon					
	2	1	2	2	7	2 Belanja Air					
	2	1	2	2	7	3 Belanja Listrik					
	2	1	2	2	7	4 Belanja Surat Kabar/Majalah					
	2	1	2	2	7	5 Belanja kawat/faksimili/internet					
	2	1	2	2	7	6 Belanja paket/pengiriman					
	2	1	2	2	7	7 Belanja sertifikat					
	2	1	2	2	7	8 Belanja dokumentasi					
	2	1	2	2	7	9 Belanja Dekorasi					
	2	1	2	2	7	10 Dst					
	2	1	2	2	8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					
	2	1	2	2	8	1 Belanja Jasa Service					
	2	1	2	2	8	2 Belanja Penggantian Suku Cadang					
	2	1	2	2	8	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas					
	2	1	2	2	8	4 Belanja Jasa KIR					
	2	1	2	2	8	5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					
	2	1	2	2	8	6 Dst					

1					2	3	4	5	6	7
	2	1	2	3		BELANJA MODAL				
	2	1	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				
	2	1	2	3	3	1 Belanja modal pengadaan mesin tik				
	2	1	2	3	3	2 Belanja modal pengadaan mesin hitung				
	2	1	2	3	3	3 Belanja modal pengadaan sound system				
	2	1	2	3	3	4 Belanja modal pengadaan kipas angin				
	2	1	2	3	3	5 Belanja modal pengadaan AC				
	2	1	2	3	3	6 Belanja modal pengadaan Televisi				
	2	1	2	3	3	7 Belanja modal pengadaan Parabola/Digital				
	2	1	2	3	3	8 Dst.....				
	2	1	2	3	4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	2	1	2	3	4	1 Belanja modal pengadaan almari				
	2	1	2	3	4	2 Belanja modal pengadaan brankas				
	2	1	2	3	4	3 Belanja modal pengadaan filing kabinet				
	2	1	2	3	4	4 Belanja modal pengadaan white board				
	2	1	2	3	4	5 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu				
	2	1	2	3	4	6 Belanja modal pengadaan podium				
	2	1	2	3	4	7 Belanja modal pengadaan neon box				
	2	1	2	3	4	8 Belanja modal pengadaan senter				
	2	1	2	3	4	9 Dst.....				
	2	1	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
	2	1	2	3	5	1 Belanja modal pengadaan komputer/PC				
	2	1	2	3	5	2 Belanja modal pengadaan komputer note book				
	2	1	2	3	5	3 Belanja modal pengadaan printer				
	2	1	2	3	5	4 Belanja modal pengadaan scanner				
	2	1	2	3	5	5 Belanja modal pengadaan monitor/display				
	2	1	2	3	5	6 Belanja modal pengadaan CPU				
	2	1	2	3	5	7 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer				
	2	1	2	3	5	8 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer				
						(hardisk, speaker)				
	2	1	2	3	5	9 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer				
	2	1	2	3	5	10 Dst.....				

1						2	3	4	5	6	7
		2	1	2	3	6	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur				
		2	1	2	3	6	1 Belanja modal pengadaan meja kerja				
		2	1	2	3	6	2 Belanja modal pengadaan meja rapat				
		2	1	2	3	6	3 Belanja modal pengadaan kursi kerja				
		2	1	2	3	6	4 Belanja modal pengadaan kursi rapat				
		2	1	2	3	6	5 Belanja modal pengadaan sofa/meja kursi tamu				
		2	1	2	3	6	6 Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang				
		2	1	2	3	6	7 Dst.....				
		2	1	3			Operasional BPD				
		2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa				
		2	1	3	2	6	Belanja Bahan Pakai Habis				
		2	1	3	2	6	1 Belanja alat tulis kantor				
		2	1	3	2	6	2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				
		2	1	3	2	6	3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
		2	1	3	2	6	4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
		2	1	3	2	6	5 Dst.....				
		2	1	3	2	13	Belanja Makanan dan Minuman				
		2	1	3	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai				
		2	1	3	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat				
		2	1	3	2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu				
		2	1	3	2	13	4 Dst.....				
		2	1	4			Operasional RT/RW				
		2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa				
		2	1	4	2	6	Belanja Bahan Pakai Habis				
		2	1	4	2	6	1 Belanja alat tulis kantor				
		2	1	4	2	6	2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				
		2	1	4	2	6	3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
		2	1	4	2	6	4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
		2	1	4	2	6	5 Dst.....				
		2	1	4	2	13	Belanja Makanan dan Minuman				
		2	1	4	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai				
		2	1	4	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat				

1				2				3	4	5	6	7
2	1	4	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu						
2	1	4	2	13	4	Dst						
2	2											
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2	2	1				Pembangunan Jalan Desa						
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa						
2	2	1	2	1		Honor Tim/Panitia						
2	2	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan						
2	2	1	2	1	2	Honor Narasumber						
2	2	1	2	1	3	Dst						
2	2	1	2	2								
2	2	1	2	2		Honor/upah harian						
2	2	1	2	2	1	Ongkos tukang						
2	2	1	2	2	2	Honor Petugas Kebersihan						
2	2	1	2	2	3	Honor Petugas Penjaga Maim						
2	2	1	2	2	4	Dst						
2	2	...				Kegiatan						
2	3											
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2	3	1				Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban						
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa						
2	3	1	2	1		Honor Tim/Panitia						
2	3	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan						
2	3	1	2	1	2	Honor Narasumber						
2	3	1	2	1	3	Dst						
2	3	1	2	5		Belanja Bahan/Material						
2	3	1	2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan						
2	3	1	2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman						
2	3	1	2	5	3	Belanja bibit ternak						
2	3	1	2	5	4	Belanja bahan obat - obatan						
2	3	1	2	5	5	Belanja bahan kimia						

1			2		3	4	5	6	7
2	3	1	2	5	6	Belanja Bahan Perawatan			
2	3	1	2	5	7	Belanja Bahan Perlengkapan			
2	3	1	2	5	8	Belanja Bahan/Perlengkapan Pelantikan			
2	3	1	2	5	9	Belanja Bahan Pokok			
2	3	1	2	5	10	Dst			
2	3	1	2	13		Belanja Makanan dan Minuman			
2	3	1	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai			
2	3	1	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat			
2	3	1	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu			
2	3	1	2	13	4	Dst			
2	3	5				Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa			
2	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	3	5	2	1		Honor Tim/Panitia			
2	3	5	2	1	6	Honor Guru Ngaji/Guru Minggu			
2	3	5	2	1	7	Dst			
2	3	...				Kegiatan			
2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1				Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	4	1	2	1		Honor Tim/Panitia			
2	4	1	2	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			
2	4	1	2	1	2	Honor Narasumber			
2	4	1	2	1	3	Dst			
2	4	1	2	5		Belanja Bahan/Material			
2	4	1	2	5	1	Belanja Bahan Baku Bangunan			
2	4	1	2	5	2	Belanja Bahan/bibit tanaman			
2	4	1	2	5	3	Belanja bibit ternak			
2	4	1	2	5	4	Belanja bahan obat - obatan			
2	4	1	2	5	5	Belanja bahan kimia			
2	4	1	2	5	6	Belanja Bahan Perawatan			

1		2		3	4	5	6	7
2	4	1	2	5	7	Belanja Bahan Perengkapan		
2	4	1	2	5	8	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan		
2	4	1	2	5	9	Belanja Bahan Pokok		
2	4	1	2	5	10	Dst		
2	4	1	2	13	Belanja Makanan dan Minuman			
2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman bariar pegawai			
2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman rapat			
2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman tamu			
2	4	1	2	13	4 Dst			
2	4	2			Kegiatan			
2	5				Bidang Tak Terduga			
2	5	1			Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa			
2	5	1	2	1	Honor Tim/Panitia			
2	5	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			
2	5	1	2	1	2 Honor Narasumber			
2	5	1	2	1	3 Dst			
2	5	1	2	5	Belanja Bahan/Material			
2	5	1	2	5	1 Belanja Bahan Baku Bangunan			
2	5	1	2	5	2 Belanja Bahan/bibit tanaman			
2	5	1	2	5	3 Belanja bibit ternak			
2	5	1	2	5	4 Belanja bahan obat - obatan			
2	5	1	2	5	5 Belanja bahan kimia			
2	5	1	2	5	6 Belanja Bahan Peralatan			
2	5	1	2	5	7 Belanja Bahan Perengkapan			
2	5	1	2	5	8 Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan			
2	5	1	2	5	9 Belanja Bahan Pokok			
2	5	1	2	5	10 Dst			

1						2	3	4	5	6	7
	2	5	1	2	13	Belanja Makanan dan Minuman					
	2	5	1	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai					
	2	5	1	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat					
	2	5	1	2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu					
	2	5	1	2	13	4 Dst:					
	2	5	2			Kegiatan					
						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS / DEFISIT					
	3					PEMBIAYAAN					
	3	1				Penerimaan Pembiayaan					
	3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya					
	3	1	1	1		Pelampauan penerimaan PADesa					
	3	1	1	1	1	Hasil Usaha Desa					
	3	1	1	1	2	Hasil Aset Desa					
	3	1	1	1	3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					
	3	1	1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
	3	1	1	2		Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya					
	3	1	1	2	1	Belanja Pegawai					
	3	1	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa					
	3	1	1	2	3	Belanja Modal					
	3	1	2			Pencairan Dana Cadangan					
	3	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan					
	3	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan Nomor					
	3	1	2	1	2	Dst:					

1					2	3	4	5	6	7
	3	1	3		Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.					
	3	1	3	1	Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes					
	3	1	3	2	BUMDes					
	3	1	3	3	Dst					
	3	1	4		Penerimaan Pinjaman					
	3	1	4	1	Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari					
	3	1	4	2	Dst					
	3	2			Pengeluaran Pembiayaan					
	3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
	3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan Nomor					
	3	2	1	2	Dst					
	3	2	2		Penyertaan Modal Desa					
	3	2	2	1	Badan Usaha Milik Desa					
	3	2	2	1	BUMDes					
	3	2	2	1	Dst					
	3	2	2	2	Badan/Lembaga/Organisasi					
	3	2	2	2	Badan/Lembaga/Organisasi					
	3	2	2	2	Dst					
	3	2	2	3	Kelompok/Anggota Masyarakat					
	3	2	2	3	Kelompok/Anggota Masyarakat					
	3	2	2	3	Dst					
	3	2	2	4	Dst					
					JUMLAH PEMBIAYAAN					

Disetujui Oleh
Kepala Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap/tanpa gelar)

III.B FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA

Nomor :

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDes
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (nama lengkap) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang beralamat di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. (nama lengkap) : Ketua BPD Desa

3. (nama lengkap) : Wakil Ketua BPD Desa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RPAPBDdes) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBDdes Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBDdes Tahun Anggaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama lengkap)

III.C. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PERUBAHAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian pendanaan :

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Situbondo,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan **kode** rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan **kode** rekening.
4. Kolom 2 diisi dengan **uraian** berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan **volume** dapat berupa jumlah orang/barang.
6. Kolom 4 diisi dengan **harga** satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang.
7. Kolom 5 diisi dengan **jumlah** perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
8. Kolom 6 diisi dengan **volume** dapat berupa jumlah orang/barang setelah perubahan.
9. Kolom 7 diisi dengan **harga** satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang setelah perubahan.
10. Kolom 8 diisi dengan **jumlah** perkalian antara kolom 6 dengan kolom 7.
11. Baris jumlah diisi **jumlah** keseluruhan.

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa

....., Tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

IV.B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D YANG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

.....
Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

.....

Pelaksana Kegiatan

.....
Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

Petunjuk pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APIBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

IV.C. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang
2. Kegiatan

KODE REKENING	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang undangan.

Situbondo,

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
4. Kolom 2 diisi dengan penerima/pembayaran yang ada di bukti belanja.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah belanja.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
8. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

Buku KAS UMUM
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

No	Tanggal	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

Kas di Bendahara Desa Rp.,- (.....)

Terdiri dari :

- a. Tunai
- b. Saldo Bank

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

IV.D.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara

IV.D3. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO :

NO.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
								BIAYA	
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan ini									
Total Transaksi Kumulatif									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

IV.E. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

IV.E.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1								2	3	4	5	6
XX	XXXX	1						PENDAPATAN				
		1	1					Pendapatan Asli Desa				
		1	1	1				Hasil Usaha Desa				
		1	1	1	1			Badan Usaha Milik Desa				
		1	1	1	2			Tanah Kas Desa				
		1	1	1	3			Koperasi Desa				
		1	1	1	4			Lumbung Desa				
		1	1	1	5			Dst.....				
		1	1	2				Hasil Aset Desa				
		1	1	2	1			Pasar Desa				
		1	1	2	2			Pasar Hewan				
		1	1	2	3			Tambatan Perahu				
		1	1	2	4			Bangunan Desa				
		1	1	2	5			Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa				
		1	1	2	6			Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	7			Hutan Desa				
		1	1	2	8			Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	9			Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	10			Pelelangan Ikan yang dikelola Desa				
		1	1	2	11			Jalan Desa				

		1	1	2	13		Lain-lain Kekayaan Milik Desa						
		1	1	2	14		Dst						
		1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
		1	1	3	1		Partisipasi masyarakat untuk kesehatan masyarakat						
		1	1	3	2		Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah						
		1	1	3	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat						
		1	1	3	4		Gotong royong kebersihan desa						
		1	1	3	5		Dst						
		1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
		1	1	5	1		Hasil penjualan aset desa yang sah						
		1	1	5	2		Jasa giro						
		1	1	5	3		Komisi						
		1	1	5	4		Pungutan Desa						
		1	1	5	4	1	Pungutan Jasa Usaha						
		1	1	5	4	2	Dst						
		1	1	5	5		Pengembalian Atas Hasil Pemeriksaan						
		1	1	5	5	1	Inspektorat						
		1	1	5	5	2	BPK						
		1	1	5	5	3	BPKP						
		1	1	5	5	4	Dst						
		1	2				Pendapatan Transfer						
		1	2	1			Dana Desa						
		1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten						
		1	2	3			Alokasi Dana Desa						
		1	2	4			Bantuan Keuangan						
		1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi						
		1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa						
		1	2	4	1	2	Dst						

		1	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten						
		1	2	4	2	1	Bantuan Biaya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa/Balai Desa						
		1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Guru Ngaji dan Guru Minggu						
		1	2	4	2	3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa						
		1	2	4	2	4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Calon Kepala Desa Terpilih						
		1	2	4	2	5	Dst						
		1	3				Pendapatan Lain - lain						
		1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
		1	3	1	1		Hibah dari pemerintah						
		1	3	1	2		Hibah dari pemerintah provinsi						
		1	3	1	3		Hibah dari pemerintah kabupaten/kota						
		1	3	1	4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta						
		1	3	1	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan						
		1	3	1	6		Sumbangan dari						
		1	3	1	7		Dst						
		1	3	2			Lain - lain Pendapatan Desa yang sah						
		1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga						
		1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa						
		1	3	2	3		Dst						
							JUMLAH PENDAPATAN						
		2					BELANJA						
		2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
		2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
		2	1	1	1		Belanja Pegawai						
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat						
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa						
		2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat						
		2	1	1	1	2	Tunjangan						
		2	1	1	1	2	dst						

[illegible]

[illegible]

Belanja Modal									
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	2	3	5	6	Belanja modal pengadaan CPU		
	2	1	2	3	5	7	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer		
	2	1	2	3	5	8	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (hardisk, speaker)		
	2	1	2	3	5	9	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer		
	2	1	2	3	5	10	Dst.....		
	2	1	2	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeleur		
	2	1	2	3	6	1	Belanja modal pengadaan meja kerja		
	2	1	2	3	6	2	Belanja modal pengadaan meja rapat		
	2	1	2	3	6	3	Belanja modal pengadaan kursi kerja		
	2	1	2	3	6	4	Belanja modal pengadaan kursi rapat		
	2	1	2	3	6	5	Belanja modal pengadaan sofa/meja kursi tamu		
	2	1	2	3	6	6	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang		
	2	1	2	3	6	7	Dst.....		
	2	1	3				Operasional BPD		
	2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
	2	1	3	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis		
	2	1	3	2	6	1	Belanja alat tulis kantor		
	2	1	3	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
	2	1	3	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		
	2	1	3	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
	2	1	3	2	6	5	Dst		
	2	1	3	2	13		Belanja Makanan dan Minuman		
	2	1	3	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
	2	1	3	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat		
	2	1	3	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
	2	1	3	2	13	4	Dst		

Operasional RT/ RW						
	2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa
	2	1	4	2	6	Belanja Bahan Pakai Habis
	2	1	4	2	6	1 Belanja alat tulis kantor
	2	1	4	2	6	2 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
	2	1	4	2	6	3 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
	2	1	4	2	6	4 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	2	1	4	2	6	5 Dst
	2	1	4	2	13	Belanja Makanan dan Minuman
	2	1	4	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
	2	1	4	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat
	2	1	4	2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu
	2	1	4	2	13	4 Dst
	2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	2	2	1			Pembangunan Jalan Desa
	2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa
	2	2	1	2	1	Honor Tim/Panitia
	2	2	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
	2	2	1	2	1	2 Honor Narasumber
	2	2	1	2	1	3 Dst
	2	2	1	2	2	Honor/upah harian
	2	2	1	2	2	1 Ongkos tukang
	2	2	1	2	2	2 Honor Petugas Kebersihan
	2	2	1	2	2	3 Honor Petugas Penjaga Malam
	2	2	1	2	2	4 Dst
	2	2	...			Kegiatan

Bidang Pembinaan Masyarakat									
	2	3	1						Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
	2	3	1	2					Belanja Barang dan Jasa
	2	3	1	2	1				Honor Tim/Panitia
	2	3	1	2	1	1			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
	2	3	1	2	1	2			Honor Narasumber
	2	3	1	2	1	3			Dst
	2	3	1	2	5				Belanja Bahan/Material
	2	3	1	2	5	1			Belanja Bahan Baku Bangunan
	2	3	1	2	5	2			Belanja Bahan/bibit tanaman
	2	3	1	2	5	3			Belanja bibit ternak
	2	3	1	2	5	4			Belanja bahan obat - obatan
	2	3	1	2	5	5			Belanja bahan kimia
	2	3	1	2	5	6			Belanja Bahan Peralatan
	2	3	1	2	5	7			Belanja Bahan Perlengkapan
	2	3	1	2	5	8			Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan
	2	3	1	2	5	9			Belanja Bahan Pokok
	2	3	1	2	5	10			Dst
	2	3	1	2	13				Belanja Makanan dan Minuman
	2	3	1	2	13	1			Belanja makanan dan minuman harian pegawai
	2	3	1	2	13	2			Belanja makanan dan minuman rapat
	2	3	1	2	13	3			Belanja makanan dan minuman tamu
	2	3	1	2	13	4			Dst
	2	3	5						Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa
	2	3	5	2					Belanja Barang dan Jasa
	2	3	5	2	1				Honor Tim/Panitia
	2	3	5	2	1	6			Honor Guru Ngaji/Guru Minggu
	2	3	5	2	1	7			Dst
	2	3	...						Kegiatan

		2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
		2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat							
		2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa							
		2	4	1	2	1	Honor Tim/Panitia							
		2	4	1	2	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan							
		2	4	1	2	1	Honor Narasumber							
		2	4	1	2	1	Dst							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan/Material							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan Baku Bangunan							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan/bibit tanaman							
		2	4	1	2	5	Belanja bibit ternak							
		2	4	1	2	5	Belanja bahan obat - obatan							
		2	4	1	2	5	Belanja bahan kimia							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan Peralatan							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan Perlengkapan							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan Pokok							
		2	4	1	2	5	Dst							
		2	4	1	2	13	Belanja Makanan dan Minuman							
		2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman harian pegawai							
		2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman rapat							
		2	4	1	2	13	Belanja makanan dan minuman tamu							
		2	4	1	2	13	Dst							
		2	4	2			Kegiatan							
		2	5				Bidang Tak Terduga							
		2	5	1			Kejadian Luar Biasa							
		2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa							
		2	5	1	2	1	Honor Tim/Panitia							
		2	5	1	2	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan							
		2	5	1	2	1	Honor Narasumber							
		2	5	1	2	1	Dst							

[illegible]

[illegible]

		3	2	1	3			Kelompok/ Anggota Masyarakat						
		3	2	2	3	1		Kelompok/ Anggota Masyarakat						
		3	2	2	3	2		Dst						
		3	2	2	4			Dst						
								JUMLAH PEMBIAYAAN						

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1								2	3	4	5	6
								PINDAHAN SALDO				
								(SEMESTER PERTAMA)				
XX	XXXX	1						PENDAPATAN				
		1	1					Pendapatan Asli Desa				
		1	1	1				Hasil Usaha Desa				
		1	1	1	1			Badan Usaha Milik Desa				
		1	1	1	2			Tanah Kas Desa				
		1	1	1	3			Koperasi Desa				
		1	1	1	4			Lumbung Desa				
		1	1	1	5			Dst.....				
		1	1	2				Hasil Aset Desa				
		1	1	2	1			Pasar Desa				
		1	1	2	2			Pasar Hewan				
		1	1	2	3			Tambatan Perahu				
		1	1	2	4			Bangunan Desa				
		1	1	2	5			Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa				
		1	1	2	6			Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	7			Hutan Desa				
		1	1	2	8			Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	9			Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	10			Pelelangan Ikan yang dikelola Desa				

		1	1	2	12		Bagian laba atas penyertaan Modal Desa						
		1	1	2	13		Lain-lain Kekayaan Milik Desa						
		1	1	2	14		Dst						
		1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
		1	1	3	1		Partisipasi masyarakat untuk kesehatan masyarakat						
		1	1	3	2		Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah						
		1	1	3	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat						
		1	1	3	4		Gotong royong kebersihan desa						
		1	1	3	5		Dst						
		1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah						
		1	1	5	1		Hasil penjualan aset desa yang sah						
		1	1	5	2		Jasa giro						
		1	1	5	3		Komisi						
		1	1	5	4		Pungutan Desa						
		1	1	5	4	1	Pungutan Jasa Usaha						
		1	1	5	4	2	Dst						
		1	1	5	5		Pengembalian Atas Hasil Pemeriksaan						
		1	1	5	5	1	Inspektorat						
		1	1	5	5	2	BPK						
		1	1	5	5	3	BPKP						
		1	1	5	5	4	Dst						
		1	2				Pendapatan Transfer						
		1	2	1			Dana Desa						
		1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten						
		1	2	3			Alokasi Dana Desa						
		1	2	4			Bantuan Keuangan						
		1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi						
		1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa						
		1	2	4	1	2	Dst						

		1	2	4	2		Bantuan Keuangan dan Pemertan Kabupaten						
		1	2	4	2	1	Bantuan Biaya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa/Balai Desa						
		1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Guru Ngaji dan Guru Minggu						
		1	2	4	2	3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa						
		1	2	4	2	4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Calon Kepala Desa Terpilih						
		1	2	4	2	5	Dst						
		1	3				Pendapatan Lain - lain						
		1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
		1	3	1	1		Hibah dari pemerintah						
		1	3	1	2		Hibah dari pemerintah provinsi						
		1	3	1	3		Hibah dari pemerintah kabupaten/kota						
		1	3	1	4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta						
		1	3	1	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan						
		1	3	1	6		Sumbangan dari						
		1	3	1	7		Dst						
		1	3	2			Lain - lain Pendapatan Desa yang sah						
		1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga						
		1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa						
		1	3	2	3		Dst						
							JUMLAH PENDAPATAN						
		2					BELANJA						
		2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
		2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
		2	1	1	1		Belanja Pegawai						
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat						
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa						
		2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat						
		2	1	1	1	2	Tunjangan						
		2	1	1	1	2	dst						

[illegible]

	2	1	2	3	8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
	2	1	2	2	8	1 Belanja Jasa Service				
	2	1	2	2	8	2 Belanja Penggantian Suku Cadang				
	2	1	2	2	8	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				
	2	1	2	2	8	4 Belanja Jasa KIR				
	2	1	2	2	8	5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				
	2	1	2	2	8	6 Dst				
	2	1	2	3		BELANJA MODAL				
	2	1	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				
	2	1	2	3	3	1 Belanja modal pengadaan mesin tik				
	2	1	2	3	3	2 Belanja modal pengadaan mesin hitung				
	2	1	2	3	3	3 Belanja modal pengadaan sound system				
	2	1	2	3	3	4 Belanja modal pengadaan kipas angin				
	2	1	2	3	3	5 Belanja modal pengadaan AC				
	2	1	2	3	3	6 Belanja modal pengadaan Televisi				
	2	1	2	3	3	7 Belanja modal pengadaan Parabola/Digital				
	2	1	2	3	3	8 Dst.....				
	2	1	2	3	4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	2	1	2	3	4	1 Belanja modal pengadaan almari				
	2	1	2	3	4	2 Belanja modal pengadaan brankas				
	2	1	2	3	4	3 Belanja modal pengadaan filling kabinet				
	2	1	2	3	4	4 Belanja modal pengadaan white board				
	2	1	2	3	4	5 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu				
	2	1	2	3	4	6 Belanja modal pengadaan podium				
	2	1	2	3	4	7 Belanja modal pengadaan neon box				
	2	1	2	3	4	8 Belanja modal pengadaan senter				
	2	1	2	3	4	9 Dst.....				
	2	1	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
	2	1	2	3	5	1 Belanja modal pengadaan komputer/PC				
	2	1	2	3	5	2 Belanja modal pengadaan komputer note book				
	2	1	2	3	5	3 Belanja modal pengadaan printer				
	2	1	2	3	5	4 Belanja modal pengadaan scanner				

[illegible]

Kode Anggaran										Keterangan										Kategori										Sub-kategori									
Kode Anggaran										Keterangan										Kategori										Sub-kategori									
										Operasional RT/RW																													
2 1 4 2										Belanja Barang dan Jasa																													
2 1 4 2 6										Belanja Bahan Pakai Habis																													
2 1 4 2 6 1										Belanja alat tulis kantor																													
2 1 4 2 6 2										Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)																													
2 1 4 2 6 3										Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya																													
2 1 4 2 6 4										Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih																													
2 1 4 2 6 5										Dst																													
2 1 4 2 13										Belanja Makanan dan Minuman																													
2 1 4 2 13 1										Belanja makanan dan minuman harian pegawai																													
2 1 4 2 13 2										Belanja makanan dan minuman rapat																													
2 1 4 2 13 3										Belanja makanan dan minuman tamu																													
2 1 4 2 13 4										Dst																													
2 2										Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																													
2 2 1										Pembangunan Jalan Desa																													
2 2 1 2										Belanja Barang dan Jasa																													
2 2 1 2 1										Honor Tim/Panitia																													
2 2 1 2 1 1										Honor Panitia Pelaksana Kegiatan																													
2 2 1 2 1 2										Honor Narasumber																													
2 2 1 2 1 3										Dst																													
2 2 1 2 2										Honor/upah harian																													
2 2 1 2 2 1										Ongkos tukang																													
2 2 1 2 2 2										Honor Petugas Kebersihan																													
2 2 1 2 2 3										Honor Petugas Penjaga Malam																													
2 2 1 2 2 4										Dst																													
2 2 ...										Kegiatan																													

[illegible]

		2	4	1			Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
		2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat							
		2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa							
		2	4	1	2	1	Honor Tim/Panitia							
		2	4	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan							
		2	4	1	2	1	2 Honor Narasumber							
		2	4	1	2	1	3 Dst							
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan/Material							
		2	4	1	2	5	1 Belanja Bahan Baku Bangunan							
		2	4	1	2	5	2 Belanja Bahan/bibit tanaman							
		2	4	1	2	5	3 Belanja bibit ternak							
		2	4	1	2	5	4 Belanja bahan obat - obatan							
		2	4	1	2	5	5 Belanja bahan kimia							
		2	4	1	2	5	6 Belanja Bahan Peralatan							
		2	4	1	2	5	7 Belanja Bahan Perlengkapan							
		2	4	1	2	5	8 Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan							
		2	4	1	2	5	9 Belanja Bahan Pokok							
		2	4	1	2	5	10 Dst							
		2	4	1	2	13	Belanja Makanan dan Minuman							
		2	4	1	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai							
		2	4	1	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat							
		2	4	1	2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu							
		2	4	1	2	13	4 Dst							
		2	4	2			Kegiatan							
		2	5				Bidang Tak Terduga							
		2	5	1			Kejadian Luar Biasa							
		2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa							
		2	5	1	2	1	Honor Tim/Panitia							
		2	5	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan							
		2	5	1	2	1	2 Honor Narasumber							
		2	5	1	2	1	3 Dst							

[illegible]

Gisa Penghematan Belanja atau Akhlak Belanja					
3	1	2			Belanja Pegawai
3	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa
3	1	2	3		Belanja Modal
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan Nomor
3	1	2	1	2	Dst.....
3	1	3			Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
3	1	3	1		Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes
3	1	3	2		BUMDes
3	1	3	3		Dst
3	1	4			Penerimaan Pinjaman
3	1	4	1		Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari
3	1	4	2		Dst
3	2				Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
3	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan Nomor
3	2	1	2		Dst
3	2	2			Penyertaan Modal Desa
3	2	2	1		Badan Usaha Milik Desa
3	2	2	1	1	BUMDes
3	2	2	1	2	Dst
3	2	2	2		Badan/Lembaga/Organisasi
3	2	2	2	1	Badan/Lembaga/Organisasi
3	2	2	2	2	Dst

**V.A FORMAT LAPORAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes
BESERTA LAMPIRAN**

V.A.1. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN.....
DESA
Alamat :.....Telp:.....

RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menctapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal.....bulan.....tahun.....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Rancangan Peraturan Desa..... Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

- Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang **Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pertukaran di Desa;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor)
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor);
 27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20....– 20... (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor ...);

28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran (Berita Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran Semula
berjumlah Rp..... bertambah / berkurang sejumlah
Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan desa Rp.
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.
 - b. Bidang Pembangunan Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp.
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
.....
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program
Dacrah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran -- lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

**(NAMA LENGKAP/TANPA
GELAR)**

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....,

(NAMA LENGKAP/TANPA GELAR)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN 1 Peraturan Desa

Tanggal :

Nomor : Tahun

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1							2	3	4	5	6
xx	xxxx	1					PENDAPATAN				
		1	1				Pendapatan Asli Desa				
		1	1	1			Hasil Usaha Desa				
		1	1	1	1		Badan Usaha Milik Desa				
		1	1	1	2		Tanah Kas Desa				
		1	1	1	3		Koperasi Desa				
		1	1	1	4		Lumbung Desa				
		1	1	1	5		Dst.....				
		1	1	2			Hasil Aset Desa				
		1	1	2	1		Pasar Desa				
		1	1	2	2		Pasar Hewan				
		1	1	2	3		Tambatan Perahu				
		1	1	2	4		Bangunan Desa				
		1	1	2	5		Obyek rekreasi/wisata yang diurus /dikelola oleh Desa				
		1	1	2	6		Pemandian umum yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	7		Hutan Desa				
		1	1	2	8		Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus/dikelola oleh Desa				
		1	1	2	9		Tempat-tempat pemancingan yang diurus/dikelola oleh Desa				

		1	1	2	1		Dana Desa					
		1	1	2	12		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Desa					
		1	1	2	13		Lain-lain Kekayaan Milik Desa					
		1	1	2	14		Dst					
		1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					
		1	1	3	1		Partisipasi masyarakat untuk kesehatan masyarakat					
		1	1	3	2		Penerimaan swadaya masyarakat untuk gerobak sampah					
		1	1	3	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat					
		1	1	3	4		Gotong royong kebersihan desa					
		1	1	3	5		Dst					
		1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
		1	1	5	1		Hasil penjualan aset desa yang sah					
		1	1	5	2		Jasa giro					
		1	1	5	3		Komisi					
		1	1	5	4		Pungutan Desa					
		1	1	5	4	1	Pungutan Jasa Usaha					
		1	1	5	4	2	Dst					
		1	1	5	5		Pengembalian Atas Hasil Pemeriksaan					
		1	1	5	5	1	Inspektorat					
		1	1	5	5	2	BPK					
		1	1	5	5	3	BPKP					
		1	1	5	5	4	Dst					
		1	2				Pendapatan Transfer					
		1	2	1			Dana Desa					
		1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten					
		1	2	3			Alokasi Dana Desa					
		1	2	4			Bantuan Keuangan					
		1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi					
		1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Desa					
		1	2	4	1	2	Dst					

		1	2	3	4	5	Bantuan Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa/Muka Desa					
		1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Guru Ngaji dan Guru Minggu					
		1	2	4	2	3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa					
		1	2	4	2	4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Calon Kepala Desa Terpilih					
		1	2	4	2	5	Dst					
		1	3				Pendapatan Lain - lain					
		1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
		1	3	1	1		Hibah dari pemerintah					
		1	3	1	2		Hibah dari pemerintah provinsi					
		1	3	1	3		Hibah dari pemerintah kabupaten/kota					
		1	3	1	4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta					
		1	3	1	5		Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan					
		1	3	1	6		Sumbangan dari					
		1	3	1	7		Dst					
		1	3	2			Lain - lain Pendapatan Desa yang sah					
		1	3	2	1		Hasil Kerjasama dengan pihak ke tiga					
		1	3	2	2		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa					
		1	3	2	3		Dst					
							JUMLAH PENDAPATAN					
		2					BELANJA					
		2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
		2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
		2	1	1	1		Belanja Pegawai					
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat					
		2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat					
		2	1	1	1	2	Tunjangan					
		2	1	1	1	2	dst					
		2	1	1	1	3	Tunjangan BPD					

		2	1	1			2	Dst					
		2	1	2				Operasional Perkantoran					
		2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa					
		2	1	2	2	4		Belanja Perjalanan Dinas					
		2	1	2	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Desa					
		2	1	2	2	4	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan					
		2	1	2	2	4	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					
		2	1	2	2	4	4	Belanja Bantuan Transport					
		2	1	2	2	4	5	Dst					
		2	1	2	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis					
		2	1	2	2	6	1	Belanja alat tulis kantor					
		2	1	2	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)					
		2	1	2	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					
		2	1	2	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					
		2	1	2	2	6	5	Dst					
		2	1	2	2	7		Belanja Jasa Kantor					
		2	1	2	2	7	1	Belanja Telepon					
		2	1	2	2	7	2	Belanja Air					
		2	1	2	2	7	3	Belanja Listrik					
		2	1	2	2	7	4	Belanja Surat Kabar/Majalah					
		2	1	2	2	7	5	Belanja kawat/faksimili/internet					
		2	1	2	2	7	6	Belanja paket/pengiriman					
		2	1	2	2	7	7	Belanja sertifikat					
		2	1	2	2	7	8	Belanja dokumentasi					
		2	1	2	2	7	9	Belanja Dekorasi					
		2	1	2	2	7	10	Dst					

		2	1	2	2	8	Belanja Pemasangan Kendaraan Bermotor						
		2	1	2	2	8	1 Belanja Jasa Service						
		2	1	2	2	8	2 Belanja Penggantian Suku Cadang						
		2	1	2	2	8	3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas						
		2	1	2	2	8	4 Belanja Jasa KIR						
		2	1	2	2	8	5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan						
		2	1	2	2	8	6 Dst.....						
		2	1	2	3		BELANJA MODAL						
		2	1	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor						
		2	1	2	3	3	1 Belanja modal pengadaan mesin tik						
		2	1	2	3	3	2 Belanja modal pengadaan mesin hitung						
		2	1	2	3	3	3 Belanja modal pengadaan sound system						
		2	1	2	3	3	4 Belanja modal pengadaan kipas angin						
		2	1	2	3	3	5 Belanja modal pengadaan AC						
		2	1	2	3	3	6 Belanja modal pengadaan Televisi						
		2	1	2	3	3	7 Belanja modal pengadaan Parabola/Digital						
		2	1	2	3	3	8 Dst.....						
		2	1	2	3	4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor						
		2	1	2	3	4	1 Belanja modal pengadaan almari						
		2	1	2	3	4	2 Belanja modal pengadaan brankas						
		2	1	2	3	4	3 Belanja modal pengadaan filling kabinet						
		2	1	2	3	4	4 Belanja modal pengadaan white board						
		2	1	2	3	4	5 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu						
		2	1	2	3	4	6 Belanja modal pengadaan podium						
		2	1	2	3	4	7 Belanja modal pengadaan neon box						
		2	1	2	3	4	8 Belanja modal pengadaan senter						
		2	1	2	3	4	9 Dst.....						
		2	1	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Komputer						
		2	1	2	3	5	1 Belanja modal pengadaan komputer/PC						
		2	1	2	3	5	2 Belanja modal pengadaan komputer note book						
		2	1	2	3	5	3 Belanja modal pengadaan printer						
		2	1	2	3	5	4 Belanja modal pengadaan scanner						

		2	1	2	3	5	6	Belanja modal pengadaan CPC					
		2	1	2	3	5	7	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer					
		2	1	2	3	5	8	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (hardisk, speaker)					
		2	1	2	3	5	9	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer					
		2	1	2	3	5	10	Dst.....					
		2	1	2	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeleur					
		2	1	2	3	6	1	Belanja modal pengadaan meja kerja					
		2	1	2	3	6	2	Belanja modal pengadaan meja rapat					
		2	1	2	3	6	3	Belanja modal pengadaan kursi kerja					
		2	1	2	3	6	4	Belanja modal pengadaan kursi rapat					
		2	1	2	3	6	5	Belanja modal pengadaan sofa/meja kursi tamu					
		2	1	2	3	6	6	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang					
		2	1	2	3	6	7	Dst.....					
		2	1	3				Operasional BPD					
		2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa					
		2	1	3	2	6		Belanja Bahan Pakai Habis					
		2	1	3	2	6	1	Belanja alat tulis kantor					
		2	1	3	2	6	2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)					
		2	1	3	2	6	3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					
		2	1	3	2	6	4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					
		2	1	3	2	6	5	Dst					
		2	1	3	2	13		Belanja Makanan dan Minuman					
		2	1	3	2	13	1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai					
		2	1	3	2	13	2	Belanja makanan dan minuman rapat					
		2	1	3	2	13	3	Belanja makanan dan minuman tamu					
		2	1	3	2	13	4	Dst					

[illegible]

Buku Kerja/Program Kerja									
No	Uraian Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	1							
2	3	1	2						
2	3	1	2	1					
2	3	1	2	1	1				
2	3	1	2	1	2				
2	3	1	2	1	3				
2	3	1	2	5					
2	3	1	2	5	1				
2	3	1	2	5	2				
2	3	1	2	5	3				
2	3	1	2	5	4				
2	3	1	2	5	5				
2	3	1	2	5	6				
2	3	1	2	5	7				
2	3	1	2	5	8				
2	3	1	2	5	9				
2	3	1	2	5	10				
2	3	1	2	13					
2	3	1	2	13	1				
2	3	1	2	13	2				
2	3	1	2	13	3				
2	3	1	2	13	4				
2	3	5							
2	3	5	2						
2	3	5	2	1					
2	3	5	2	1	6				
2	3	5	2	1	7				
2	3	...							

Produk: 1.000.000,00

		2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
		2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa					
		2	4	1	2	1	Honor Tim/Panitia					
		2	4	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan					
		2	4	1	2	1	2 Honor Narasumber					
		2	4	1	2	1	3 Dst					
		2	4	1	2	5	Belanja Bahan/Material					
		2	4	1	2	5	1 Belanja Bahan Baku Bangunan					
		2	4	1	2	5	2 Belanja Bahan/bibit tanaman					
		2	4	1	2	5	3 Belanja bibit ternak					
		2	4	1	2	5	4 Belanja bahan obat - obatan					
		2	4	1	2	5	5 Belanja bahan kimia					
		2	4	1	2	5	6 Belanja Bahan Peralatan					
		2	4	1	2	5	7 Belanja Bahan Perlengkapan					
		2	4	1	2	5	8 Belanja Bahan/Peralatan Pelatihan					
		2	4	1	2	5	9 Belanja Bahan Pokok					
		2	4	1	2	5	10 Dst					
		2	4	1	2	13	Belanja Makanan dan Minuman					
		2	4	1	2	13	1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai					
		2	4	1	2	13	2 Belanja makanan dan minuman rapat					
		2	4	1	2	13	3 Belanja makanan dan minuman tamu					
		2	4	1	2	13	4 Dst					
		2	4	2			Kegiatan					
		2	5				Bidang Tak Terduga					
		2	5	1			Kejadian Luar Biasa					
		2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa					
		2	5	1	2	1	Honor Tim/Panitia					
		2	5	1	2	1	1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan					
		2	5	1	2	1	2 Honor Narasumber					
		2	5	1	2	1	3 Dst					

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3 1 1 2 3						Belanja Pegawai			
3	1	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
3	1	1	2	3		Belanja Modal			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan			
3	1	2	1	1		Pencairan Dana Cadangan Nomor			
3	1	2	1	2		Dst.....			
3	1	3				Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3	1	3	1			Hasil penjualan perusahaan milik desa/BUMDes			
3	1	3	2			BUMDes			
3	1	3	3			Dst			
3	1	4				Penerimaan Pinjaman			
3	1	4	1			Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari			
3	1	4	2			Dst			
JUMLAH (Rp.)									
3	2					Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Nomor			
3	2	1	2			Dst.....			
3	2	2				Penyertaan Modal Desa			
3	2	2	1			Badan Usaha Milik Desa			
3	2	2	1	1		BUMDes			
3	2	2	1	2		Dst			
3	2	2	2			Badan/Lembaga/Organisasi			
3	2	2	2	1		Badan/Lembaga/Organisasi			
3	2	2	2	2		Dst			

		3	2	2	3			Rekening Anggota Masyarakat					
		3	2	2	3	1		Asesmpu/ Anggota Masyarakat					
		3	2	2	3	2		Dst					
		3	2	2	4			Dst					
								JUMLAH (Rp.)					
								- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN -					
								PENGELUARAN PEMBIAYAAN)					
								- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO					
								DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)					

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

V.A.3 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.....

LAMPIRAN II Peraturan Desa

Tanggal :

Nomor : Tahun

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.....

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N - 1 (Tahun Sebelumnya)
1	2	3
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan dan Instalasi		
dst		

1	2	3
3. Dana Cadangan		
Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A+B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		

....., tanggal

Kepala Desa

TTD

(.....)

Penjelasan tabel :

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 2. Uang Kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening Kas Desa.
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel materai, deposito, giro.
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

V.A.4 PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

LAMPIRAN III Peraturan Desa

Tanggal :

Nomor : Tahun

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp.)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

....., tanggal

Kepala Desa

(.....)

Pj. BUPATI SITUBONDO,



ZAINAL MUHTADIEN